

## Manajemen Persepsi dan Otoritas Simbolik: Analisa Kritis Gaya Komunikasi Politik Elite Era Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nur Azizah<sup>1</sup>, Launa<sup>2</sup>, Bambang Mudjiyanto<sup>3</sup>, Hayu Lusianawati<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Politik, FISIP Universitas Bung Karno, Jakarta

<sup>2,4</sup>Prodi Ilmu Komunikasi, FIKOM Universitas SAHID, Jakarta

<sup>3</sup>Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta

E-mail: [launa@usahid.ac.id](mailto:launa@usahid.ac.id)

---

### Article Info

#### Article history:

Received June 01, 2026

Revised June 03, 2026

Accepted June 05, 2026

---

#### Keywords:

Perception Management, Symbolic Authority, Elite Political Communication, Discursive Accountability, Political Legitimacy

---

### ABSTRACT

*This study examines the political communication patterns of elites during the Prabowo-Gibran era related to the interaction between perception management and the construction of symbolic authority. Using a critical-interpretive qualitative approach and case studies, this study analyzes primary and secondary data through framing theory, symbolic authority, and discursive ethics theory. The study's indicate that centralized and repetitive communication strategies successfully consolidated legitimacy through the production of meaning and the instrumentalization of national symbols. The intensification of narratives obscured transparency, narrowed the space for deliberation, and shifted rational-critical legitimacy. The study recommends strengthening government communication ethics protocols, proactively transparency of policy data, and revitalizing deliberative public spaces to maintain discursive accountability and the quality of democracy in the post-truth era of politics.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

### Article Info

#### Article history:

Received June 01, 2026

Revised June 03, 2026

Accepted June 05, 2026

---

#### Kata Kunci:

Manajemen Persepsi, Otoritas Simbolik, Komunikasi Politik Elite, Akuntabilitas Diskursif, Legitimasi Politik

---

### ABSTRAK

Studi ini coba melihat secara kritis pola komunikasi politik elite era Prabowo-Gibran. Fokus kajian pada interaksi antara manajemen persepsi dan konstruksi otoritas simbolik. Menggunakan pendekatan kualitatif kritis-interpretif dan studi kasus, studi ini menganalisis data primer dan sekunder melalui teori framing, otoritas simbolik, dan teori etika diskursif. Temuan kajian menunjukkan bahwa strategi komunikasi terpusat dan repetitif berhasil mengonsolidasi legitimasi melalui produksi makna dan instrumentalisasi simbo kebangsaan. Namun, intensifikasi narasi potensial mengaburkan transparansi, mempersempit ruang deliberasi, dan menggeser legitimasi berbasis rasional-kritis ke konsensus terkelola. Kajian merekomendasi penguatan protokol etika komunikasi pemerintahan, transparansi data kebijakan secara proaktif, serta revitalisasi ruang publik deliberatif guna menjaga akuntabilitas diskursif dan kualitas demokrasi di era politik pascakebenaran.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



**Corresponding Author:**

Launa  
Universitas SAHID Jakarta  
Email: [launa@usahid.ac.id](mailto:launa@usahid.ac.id)

## PENDAHULUAN

Transformasi lanskap komunikasi politik Indonesia memasuki fase baru yang ditandai oleh konvergensi infrastruktur digital dan dinamika *post-truth*, di mana verifikasi faktual kerap tergeser oleh resonansi emosional dan narasi algoritmik (Waisbord, 2023; Harsin, 2024). Pergeseran epistemik ini mengubah mekanisme konstruksi kekuasaan, dimana narasi dan simbol visual tidak lagi sekadar instrumen elektoral, melainkan strategi legitimasi pasca-elektoral. Media, dalam perspektif Herman dan Chomsky (1988), bertransformasi menjadi institusi ideologis yang memproduksi *consent* melalui *selective framing*, sehingga batas antara realitas objektif dan konstruksi sosial menjadi kabur (Bennett & Livingston, 2018).

Secara teoritis, dinamika ini dianalisis melalui integrasi konsep manajemen persepsi dan otoritas simbolik. Manajemen persepsi merujuk pada praktik terstruktur dalam memodifikasi interpretasi publik melalui seleksi fakta dan konsistensi pesan (Entman, 1993). Sementara itu, otoritas simbolik menjelaskan legitimasi yang diperoleh melalui pengakuan sosial terhadap wacana dan posisi institusional elite. Sinergi kedua konsep ini menciptakan mekanisme kekuasaan yang bekerja pada tingkat kognitif-afektif, sering kali mendahului kesadaran kritis khalayak (Bourdieu, 1991).

Dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran, fenomena ini tercermin dari proses konsolidasi narasi kebangsaan yang sentralistik dan integrasi komunikasi antarlembaga yang makin sentralistik dan terkoordinasi. Berbeda dengan pendekatan persuasif konvensional, pola komunikasi era Prabowo-Gibran ini menekankan konstruksi makna yang stabil dan repetitif untuk mempersempit ruang interpretasi alternatif. Namun, intensifikasi manajemen persepsi ini berpotensi mengaburkan batas etika komunikasi, memunculkan dilema seperti minimnya transparansi sumber dan instrumentalisme simbol negara yang menuntut evaluasi kritis (Tapsell, 2021; Trzcinski, 2023).

Kerangka teoritis kajian ini diintegrasikan dari tiga perspektif kunci: otoritas simbolik Bourdieu (1991), teori pemingkakan Entman (1993), dan model *manufacturing consent* Herman dan Chomsky (1988). Bourdieu menjelaskan bagaimana legitimasi kekuasaan dikonstruksi melalui pengakuan sosial terhadap wacana dominan, representasi visual, dan posisi institusional elite. Entman melengkapi perspektif ini pada dimensi kognitif dengan menyoroti mekanisme framing, yaitu proses seleksi dan penonjolan makna tertentu dalam pesan politik untuk mengarahkan interpretasi publik. Sementara itu, Herman dan Chomsky menawarkan dimensi struktural melalui lima filter propaganda—kepemilikan media, pendanaan, sumber informasi, *flak*, dan ideologi dominan—yang menunjukkan bagaimana

infrastruktur informasi beroperasi secara sistematis untuk memproduksi persetujuan publik (*public consent*) demi kepentingan elite.

Sinergi ketiga kerangka tersebut membentuk lensa analitis yang mencakup dimensi struktural (kontrol media dan kelembagaan), kognitif (konstruksi makna dan pembingkaihan), serta normatif-etis (akuntabilitas diskursif). Melalui integrasi ini, kajian tidak hanya memetakan mekanisme pengelolaan persepsi dan legitimasi simbolik, tetapi juga secara kritis mengidentifikasi erosi prinsip kejujuran faktual, transparansi informasi, dan tanggung jawab publik dalam ruang demokrasi. Pendekatan multidimensi ini memungkinkan evaluasi yang melampaui efektivitas strategis komunikasi politik, menuju penilaian terhadap integritas etis dan kualitas deliberasi publik di era pascakebenaran.

Adapun tujuan kajian mengisi kesenjangan literatur dengan menggeser fokus dari efektivitas kampanye elektoral menuju evaluasi etika komunikasi pemerintahan. Adapun rumusan masalah kajian adalah: (1) bagaimana pola manajemen persepsi dan konstruksi otoritas simbolik elite diwujudkan dalam praktik komunikasi publik era Prabowo-Gibran?; (2) tantangan etika apa yang muncul dan bagaimana dampaknya terhadap akuntabilitas wacana politik?; dan (3) bagaimana implikasi pola tersebut terhadap persepsi publik mengenai legitimasi pemerintahan?

Kebaruan (*novelty*) kajian ini terletak pada integrasi analisis strategis dengan evaluasi normatif-etis. Dengan memadukan lensa Bourdieu, Entman, serta kritik struktural Herman dan Chomsky, kajian ini menawarkan kerangka evaluatif yang melampaui metrik algoritmik, guna menilai integritas komunikasi elite terhadap prinsip transparansi dan kualitas ruang publik demokrasi di era pascakebenaran.

## TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan kajian mutakhir terkait komunikasi politik di Indonesia (*state of the art*) banyak berfokus pada isu efektivitas kampanye digital, isu dinamika algoritma media sosial, dan isu-isu polarisasi elektoral, seperti studi Al Fatih et al. (2024), Hermawan (2025), dan Swari et al. (2025). Disamping itu, studi lain juga menelaah strategi narasi kebangsaan dan integrasi komunikasi antarlembaga formal-institusional sebagai instrumen stabilisasi politik pascapemilu, seperti terekam dalam studi Vaara et al. (2016), Rahayu et al. (2023), dan studi Nurhayati, (2025).

Judul Artikel/Penulis	Fokus/Pendekatan	Temuan Utama	Relevansi Kajian
Peran Algoritma Media Sosial dalam Penyebaran Propaganda Politik Digital Menjelang Pemilu. Al Fatih I. Z. et al. (2024)	<ul style="list-style-type: none"><li>Mekanisme algoritmik, sirkulasi propaganda, polarisasi ruang digital.</li><li>Analisis isi kuantitatif dan pemetaan jaringan (<i>network analysis</i>).</li></ul>	Logika algoritma memperkuat amplifikasi konten emosional dan provokatif, mempercepat viralitas narasi politik, dan memperdalam ruang gema ( <i>echo chamber</i> ).	Memberi peta teknis paparan pesan digital, namun belum menyentuh dimensi etis komunikasi, konstruksi otoritas simbolik, dan persepsi elite pascapemilu.
Political Communication in the Digital Era: The Role of Social Media in Shaping	<ul style="list-style-type: none"><li>Peran media sosial, pembentukan opini publik, dan strategi komunikasi digital.</li></ul>	Platform digital menjadi katalis utama pembentukan opini, namun akurasi informasi, kredibili-	Memberi peta teknis dinamika opini publik pada fase elektoral, kendala kurang evaluatif



Public Opinion in the 2024 Election. Hermawan (2025)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Survei opini publik dan analisis wacana digital terstruktur.</li> </ul>	tas sumber, dan literasi media menentukan efektivitas pesan politik.	atas integritas etis dan legitimasi simbolik dalam komunikasi.
Dampak Penggunaan Media Sosial dan Kampanye Digital Terhadap Perilaku Pemilih Pemula (Gen Z) Dalam Pilkada Bali. Swari N. K. T. N. et al. (2025)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kampanye digital, perilaku pemilih pemula (Gen Z), efektivitas pesan visual/emosional</li> <li>• Kuesioner terstruktur dan analisis regresi perilaku pemilih.</li> </ul>	Kampanye digital secara signifikan memengaruhi preferensi voting Gen Z, terutama melalui konten visual, kolaborasi influencer, dan narasi emosional.	Fokus pada segmentasi demografis dan konteks daerah, membahas pola komunikasi elite Bali, manajemen persepsi terlembaga, dan konstruksi otoritas simbolik kekuasaan lokal.
Narratives as Sources of Stability and Change in Organizations: Approaches and Directions for Future Research. Vaara, E. et al. (2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fungsi narasi dalam konstruksi stabilitas dan perubahan organisasional.</li> <li>• Sintesis literatur dan kajian teoritis naratif-organisasional.</li> </ul>	Narasi berperan sebagai kekuatan konstitutif yang membentuk identitas, melegitimasi tindakan, dan mengelola dinamika legitimasi-institusional	Memberi fondasi teoritis kuat untuk memahami bagaimana elite menggunakan narasi untuk membangun otoritas simbolik.
Political Communication Strategy in Legislative Elections in Indonesia (Case Study on Indonesian Legislative Members of the Golkar Party). Rahayu, H. S. et al. (2025)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi komunikasi politik, branding partai-personal, pendekatan konstituen.</li> <li>• Studi kasus kualitatif (<i>in depth interview</i>, observasi, dan analisis dokumen)</li> </ul>	Efektivitas pesan politik bergantung pada integrasi media hybrid, konsistensi branding, dan responsivitas terhadap aspirasi pemilih lokal.	Memberi pemeta praktik komunikasi politik di Indonesia. <i>Gap</i> : Terbatas pada fase kampanye legislatif, bersifat deskriptif-strategis, belum menyentuh manajemen persepsi pascapemerintahan atau konstruksi otoritas simbolik level eksekutif.
Di Balik Rutinitas Pemilu: Integritas di Tengah Ketegangan Institusional, Demokrasi, dan Kepemimpinan. Nurhayati, A. (2025)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integritas elektoral, ketegangan institusional, etika kepemimpinan demokratis.</li> <li>• Analisis normatif-kritis dan studi kebijakan elektoral.</li> </ul>	Proses demokrasi menghadapi dilema integritas akibat tekanan institusional, fragmentasi kepercayaan publik, dan tantangan etika kepemimpinan	Memberi peta dimensi etika dan legitimasi institusional terkait akuntabilitas komunikasi elite. <i>Gap</i> : Fokus pada prosedur pemilu dan ketegangan struktural, bukan pada pola komunikasi, manajemen persepsi terlembaga, atau analisis diskursif.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Meski studi-studi tersebut menyajikan pemetaan empiris yang relatif komprehensif, namun lingkup kajiannya masih terbatas karena secara konsisten menempatkan infrastruktur digital, strategi naratif, dan integritas institusional sebagai pilar dinamika komunikasi politik kontemporer. Media sosial tidak lagi berfungsi sekadar saluran distribusi, melainkan ruang

produksi makna yang mempercepat sirkulasi pesan, membentuk opini publik secara masif, dan memperkuat legitimasi melalui pendekatan emosional serta visual.

Ruang lingkup studi masih terbatas pada fase elektoral atau konteks organisasional, dengan penekanan utama pada metrik penyebaran dan efektivitas kampanye. Pendekatan yang digunakan cenderung deskriptif-strategis, sehingga mengabaikan evaluasi kritis terhadap etika komunikasi, konstruksi otoritas simbolik, dan akuntabilitas diskursif dalam pemerintahan Prabowo-Gibran pascakemenangan elektoral.

## METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dipadukan dengan kerangka analisis kritis-interpretif. Pemilihan desain tersebut dilandasi oleh kebutuhan untuk mengungkap secara mendalam konstruksi makna dan relasi kuasa yang termanifestasi dalam pola komunikasi politik elite pada era pemerintahan Prabowo-Gibran. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi strategi naratif, pemanfaatan simbol institusional, serta implikasi etis yang melekat pada praktik komunikasi, tanpa mengabaikan dinamika sosiopolitik yang menyertainya (Yin, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui strategi triangulasi sumber dan metode, mencakup wawancara mendalam bersifat nonpartisipan, pemilihan teks kunci secara purposif, serta studi pustaka dan dokumen terhadap konten media yang telah terverifikasi. Proses pengambilan data mengacu pada prinsip *theoretical sampling*, yakni prosedur pengumpulan data yang diarahkan oleh perkembangan temuan awal dan kerangka teoritis hingga tercapai kejenuhan informasi (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data secara lebih utuh, teruji validitasnya melalui konvergensi perspektif, dan selaras secara teoritis dengan fokus kajian mengenai pola komunikasi politik elite.

Analisis data mengadopsi model interaktif yang dilaksanakan secara iteratif melalui tiga alur: kondensasi data, penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap kondensasi, dilakukan seleksi dan pemfokusan terhadap data mentah guna mengisolasi unit makna yang relevan dengan fokus kajian. Tahap penyajian data diwujudkan melalui narasi sistematis, matriks temuan, dan kutipan langsung yang terkontekstualisasi untuk memfasilitasi identifikasi pola pembingkaihan (*framing*) serta mekanisme konstruksi legitimasi, sehingga alur temuan dapat ditelusuri dan diverifikasi secara konseptual dan akademis (Miles et al., 2014).

Keabsahan data dijaga melalui teknik *member checking*, yang melibatkan konfirmasi interpretasi peneliti kepada sumber kunci guna meminimalkan bias subjektif dan memastikan akurasi makna. Data selanjutnya disajikan secara tematik dan dilengkapi dengan interpretasi kritis yang menghubungkan temuan empiris dengan kerangka teoritis manajemen persepsi dan otoritas simbolik. Alur analisis dan argumentasi akademis dirancang sistematis, dengan menimbang aspek kohesi, koherensi, dan konjungsi sehingga memastikan keterlacakan, konsistensi logis, serta pertanggungjawaban akademik temuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Manajemen Persepsi, Produksi Makna, dan Konstruksi Otoritas Simbolik Elite dalam Ekosistem Komunikasi Politik Era Prabowo–Gibran

Transformasi ekosistem komunikasi politik di Indonesia memasuki fase baru yang ditandai oleh konvergensi infrastruktur digital dan logika pascakebenaran (*post-truth*). Dalam konteks ini, validitas faktual kerap terdesak oleh resonansi emosional, identitas kolektif, dan algoritma yang memprioritaskan keterlibatan (*engagement*) di atas verifikasi epistemik. Pergeseran tersebut mengubah komunikasi politik dari sekadar medium penyampaian kebijakan menjadi arena produksi makna yang kompetitif. Narasi, simbol visual, dan ritme pemberitaan tidak lagi berfungsi sebagai pelengkap diskursus publik, melainkan menjadi instrumen strategis dalam mengelola interpretasi kolektif dan mengkonsolidasi legitimasi kekuasaan (Harsin, 2015; Waisbord, 2023).

Manajemen persepsi dalam ekosistem ini beroperasi sebagai praktik terstruktur yang mengintegrasikan seleksi informasi, pembingkaihan (*framing*), dan pengulangan pesan secara sistematis. Berdasarkan perspektif Entman (1993), *framing* bekerja melalui penonjolan aspek tertentu dari realitas sekaligus pengaburan elemen lain, sehingga membentuk skema kognitif yang mudah diakses publik. Dalam praktik pemerintahan, mekanisme ini tidak lagi mengandalkan persuasi rasional konvensional, melainkan memanfaatkan kurasi algoritmik dan sinkronisasi pesan lintas kanal untuk menciptakan konsistensi persepsi yang stabil dan terukur (Bennett & Livingston, 2020).

Produksi makna yang menyertai manajemen persepsi bersifat multidimensi, mencakup dimensi tekstual, visual, dan afektif. Narasi politik tidak sekadar mengkomunikasikan kebijakan, tetapi juga mengaktifkan memori kolektif, simbol kebangsaan, dan emosi identitas untuk memperkuat ikatan antara elite dan konstituen. Proses produksi makna ini dipercepat oleh arsitektur media sosial yang memungkinkan viralitas konten berbasis afeksi, sehingga batas antara fakta, opini, dan konstruksi emosional menjadi semakin cair. Akibatnya, makna politik tidak lagi bersifat tetap, melainkan cair dan terus dinegosiasikan melalui interaksi antara pesan resmi, amplifikasi jaringan, dan respons audiens (Lim, 2022; Tapsell, 2022).

Dalam kerangka sosiologis, konsolidasi makna tersebut berkontribusi pada konstruksi otoritas simbolik elite. Sebagaimana dirumuskan Bourdieu (1991), otoritas simbolik merupakan bentuk kekuasaan halus yang bekerja melalui pengakuan sosial terhadap wacana, representasi, dan posisi institusional yang dipegang oleh aktor politik. Otoritas ini tidak dipaksakan melalui cara-cara koersif, melainkan dinaturalisasi melalui ritual kenegaraan, klaim representasi rakyat, dan standar visual yang dipaksakan. Ketika publik menerima narasi elite sebagai sah tanpa kritik, maka otoritas simbolik tersebut telah berhasil menginternalisasi diri dalam kesadaran kolektif.

Era pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan pola komunikasi yang merefleksikan integrasi ketiga dimensi tersebut secara sistematis dan terlembaga. Konsolidasi narasi persatuan, stabilitas, dan kontinuitas pembangunan dikomunikasikan melalui pesan yang terpusat, repetitif, dan terkoordinasi antarlembaga eksekutif. Pola ini menandai pergeseran dari pendekatan komunikatif yang terfragmentasi menuju arsitektur pesan yang sinergis, di mana setiap pernyataan resmi, kunjungan lapangan, dan konten digital dirancang untuk memperkuat satu narasi inti (Putra, 2025). Konsistensi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai strategi legitimasi awal, tetapi juga sebagai mekanisme stabilisasi lingkungan informasi di tengah fragmentasi publik (Warburton & Aspinnall, 2019).

Mekanisme teknologis memperkuat konstruksi otoritas simbolik melalui validasi algoritmik dan ekosistem ruang gema (*echo chamber*). Infrastruktur digital memungkinkan elite menguji respons audiens secara *real-time*, menyesuaikan narasi berdasarkan metrik keterlibatan, dan mendistribusikan pesan melalui jaringan terkoordinasi yang mencakup akun resmi, media afiliasi, serta kreator konten. Dalam kondisi ini, otoritas simbolik tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kredibilitas institusi tradisional, melainkan juga pada kapasitas elite politik dalam memahami ekonomi perhatian (*attention economy*) dan memonetisasi visibilitas digital sebagai modal legitimasi politik (Waisbord, 2023; Harsin, 2015).

Namun, intensifikasi manajemen persepsi dan produksi makna yang terpusat memunculkan dilema etika komunikasi politik. Ketika transparansi sumber informasi berkurang, pembingkaiannya menjadi sangat selektif, dan simbol negara diinstrumentalisasi untuk konsolidasi dukungan, ruang deliberasi publik berpotensi menyempit (Putra, 2025). Akuntabilitas diskursif melemah apabila komunikasi lebih berorientasi pada pengendalian makna daripada pertukaran argumen substantif. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mendegradasi kualitas demokrasi menjadi legitimasi berbasis konsensus permukaan yang rentan terhadap polarisasi dan apatisme kritis (Habermas, 2021; Sunstein, 2017).

Secara analitik, manajemen kepribadian (persepsi, produksi makna, dan konstruksi otoritas simbolik, seperti tersaji pada tabel di bawah) merepresentasikan rekonfigurasi legitimasi politik di era digital. Ketiganya tidak beroperasi secara terpisah, melainkan saling menguatkan siklus politik yang terintegrasi. Penggunaan manajemen *triad* (ciri kepribadian negatif, manipulatif, dan sentralistik) diperlukan untuk memetakan efektivitas strategi komunikasi Prabowo, sekaligus merumuskan standar etis komunikasi pemerintahan guna merevitalisasi ruang publik demokratis yang selama pemerintahan Jokowi yang mengalami ‘tekanan diskursif’ (tertutup dan anti-kritik).

<p>Silaturahmi dan diskusi di Istana Negara: mempertajam simbol persatuan dan rekonsiliasi elite nasional(Maret 2026)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada 03 Maret 2026, Prabowo mengundang tokoh nasional dan Ketua Umum Parpol untuk berdialog terkait situasi nasional dan kondisi geopolitik global</li> <li>• Peristiwa ini tidak bisa dibaca sebagai sekadar forum konsultasi kebijakan biasa, melainkan harus dibaca sebagai proses ritual simbolik yang mengonstruksi narasi ‘persatuan di atas perbedaan’. Bagi Bourdieu (1991), dialog semacam ini berfungsi sebagai mekanisme naturalisasi otoritas: dengan menghadirkan para mantan presiden dan tokoh nasional dalam satu ruang, telah memposisikan Prabowo sebagai <i>primus inter pares</i> (legitimatif dan diakui oleh elite pendahulu). Narasi ini diproduksi secara repetitif melalui siaran resmi dan media afiliasi untuk memperkuat persepsi publik bahwa stabilitas politik terjaga dan keputusan pemerintah bersifat kolektif, bukan otoriter.</li> </ul>
<p>Peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG): instrumentalisasi simbol keadilan sosial (Januari–Februari 2025)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di pertengahan tahun 2026, lanskap politik di Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka telah bergeser ke arah model ‘Indonesia Incorporated’ yang sangat sentralistik, dengan fokus pada percepatan proyek pembangunan infrastruktur besar-besaran dan implementasi program kesejahteraan sosial, seperti makan siang gratis di sekolah</li> <li>• Peluncuran MBG tidak hanya menjadi kebijakan substantif (bahkan program unggulan Prabowo-</li> </ul>

	<p>Gibran), tetapi juga telah digunakan sebagai produksi makna simbolik yang menghubungkan pemerintahan Prabowo–Gibran dengan janji konstitusi tentang keadilan sosial.</p>
<p>Konstruksi otoritas simbolik di pentas global: diplomasi internasional Prabowo (April–September 2025)</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prabowo terlibat aktif dalam diplomasi internasional, termasuk pidato di parlemen Turki dan komitmen mendukung Palestina. Ini adalah strategi eksternalisasi otoritas simbolik</li><li>• Dengan memosisikan Indonesia sebagai mediator moral dalam isu global, Prabowo sukses mengonstruksi citra ‘pemimpin yang diakui dunia’. Simbol ‘diplomasi aktif’ Indonesia diproduksi melalui narasi media resmi dan media sosial lintas platform, memperkuat persepsi publik bahwa Prabowo memiliki legitimasi pengaruh internasional. Konstruksi ini relevan dengan teori Bourdieu, bahwa legitimasi dan pengakuan internasional menjadi modal simbolik yang bisa dikonversi menjadi model legitimasi politik domestik Prabowo.</li></ul>
<p>Simbol negara protektif versi Prabowo: Penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar (Desember 2025)</p>  <p>PRABOWO TEGASKAN INDONESIA MAMPU ATASI MUSIBAH DI ACEH, SUMUT, DAN SUMBAR</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Respons cepat pemerintah terhadap banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar akhir tahun 2025 dikomunikasikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai bukti ‘negara yang hadir dalam krisis’. Respons ini menunjukkan sebagai narasi state capacity dan wujud empati presiden. Dalam kerangka manajemen persepsi, framing ini mengalihkan atensi menuju respons positif publik, sehingga memperkuat persepsi publik atas kompetensi dan kepedulian pemimpin. Simbol ‘solidaritas nasional’ diaktifkan rezim untuk mengkonsolidasi dukungan publik di tengah ketidakpastian politik pasca pelantikan Prabowo-Gibran, guna meminimalkan diskursus kritis dan menguatkan hegemoni wacana versi negara.</li></ul>

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

### Etika Komunikasi Politik, Strategi Representasi, dan Isu Pengelolaan Wacana Publik

Di era Prabowo-Gibran, wacana publik juga tak luput degradasi, ditandai oleh erosi batas antara fakta, opini, dan manipulasi narasi (Rohmah & Meriwijaya, 2025). Padahal, dalam konteks etis komunikasi, opini publik tidak dapat direduksi sebatas norma prosedural, melainkan menjadi prasyarat epistemik bagi keberlangsungan demokrasi ruang publik yang deliberatif. Seperti ditegaskan Habermas (1991), validitas klaim komunikatif—kejujuran, kebenaran, dan ketepatan informasi—merupakan fondasi rasionalitas ruang publik. Ketika prinsip-prinsip ini terabaikan, wacana publik berisiko terdegradasi menjadi arena pertarungan hegemonik yang mengutamakan kemenangan strategis elite atas kebenaran informatif.

Secara konseptual, etika komunikasi politik, merujuk pada seperangkat prinsip normatif yang mengatur praktik penyampaian pesan politik dalam ruang publik. Prinsip inti meliputi akurasi, faktualitas, transparansi sumber, penghormatan terhadap otonomi khalayak, dan tanggung jawab moral atas isi pesan. Dalam perspektif diskursif, etika bukan sekadar ‘pagar etis’ atas informasi manipulatif, melainkan komitmen terhadap inklusivitas partisipan,

kesetaraan, dan ketiadaan koersi eksternal atas informasi. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini tidak hanya berpotensi merusak kredibilitas komunikator (para elite politik), tetapi juga berpotensi merusak kapasitas kognisi publik dalam membentuk objektivitas dan faktualitas atas informasi politik (Habermas, 1991; Christians et al., 2009).

Strategi representasi merupakan instrumen operasional dimana makna politik dikonstruksi, diseleksi, dan dipresentasikan kepada publik. Berdasarkan kerangka Entman (1993), representasi bekerja melalui mekanisme pembingkaihan (*framing*): menonjolkan aspek tertentu dari realitas sambil mengaburkan makna elemen lain untuk mempromosikan definisi masalah, interpretasi kausal, evaluasi moral, atau rekomendasi solusi tertentu. Dalam praktik komunikasi politik, strategi ini sering kali diintegrasikan dengan narasi emosional, simbol visual, dan kurasi algoritmik (pengaturan/penyaringan berita) guna memaksimalkan resonansi atau membentuk persepsi/opini publik. Saat representasi diseleksi/dimanipulasi, ia berpotensi mendistorsi pemahaman publik terhadap realitas kebijakan politik yang kompleks.

Ketegangan mendasar muncul saat strategi representasi instrumental bertentangan dengan kewajiban etis komunikasi politik. Dalam logika *post-truth*, keberhasilan pesan sering diukur melalui *engagement* dan viralitas, bukan melalui akurasi atau kontribusi atas deliberasi substantif (Waisbord, 2018). Kondisi ini menciptakan insentif struktural bagi elite politik untuk memprioritaskan agenda framing (memobilisasi isu identitas) ketimbang menyajikan analisis kebijakan yang komprehensif. Akibatnya, terjadi disonansi antara efisiensi persuasif dan integritas diskursif, yang melemahkan akuntabilitas komunikator terhadap publik.

Akuntabilitas diskursif merujuk pada kewajiban epistemik dan moral komunikator politik untuk mempertanggungjawabkan validitas klaim, kerangka normatif, serta implikasi kebijakan dari pesan yang mereka sirkulasi dalam ruang publik. Konsep ini melampaui akuntabilitas prosedural (yang menekankan kepatuhan regulasi), dan menekankan tanggung jawab kualitatif atas deliberasi dan integritas wacana kolektif. Prinsipnya mensyaratkan transparansi sumber informasi, keterbukaan terhadap sanggahan substantif, serta kesiapan merevisi narasi berdasarkan faktualitas dan verifikasi empiris. Absennya mekanisme ini mereduksi komunikasi politik menjadi instrumen legitimasi tertutup yang mengabaikan koreksi publik dan menggerus fondasi demokrasi deliberatif (Chouldry, 2012).

Problem utama dalam tata kelola wacana publik kontemporer adalah melemahnya institusi penengah (*intermediary institutions*) yang secara tradisional berfungsi sebagai penjaga akuntabilitas diskursif, seperti media independen, lembaga factchecking, dan forum deliberatif sipil. Ketika infrastruktur digital memungkinkan elite politik berkomunikasi langsung dengan konstituen tanpa filter editorial, mekanisme verifikasi dan koreksi kolektif menjadi semakin marginal (Bennett & Livingston, 2018). Dalam kondisi ini, strategi representasi yang tidak etis dapat menyebar luas sebelum mendapat sanggahan substantif, sehingga memperkuat asimetri informasi antara elite dan masyarakat.

Implikasi demokratis dari problem ini bersifat struktural, yakni ketika akuntabilitas diskursif melemah, maka kualitas legitimasi politik juga tergerus. Legitimasi yang dibangun melalui representasi manipulatif cenderung rapuh karena bergantung pada konsensus permukaan (atau kesepakatan elit) yang rentan terhadap fakta alternatif yang muncul (lihat tabel analisis di bawah). Lebih jauh, degradasi wacana publik memperparah polarisasi afektif, di mana perbedaan kebijakan direduksi menjadi konflik identitas yang tidak terdamaikan.

Dalam jangka panjang, hal ini mengikis kapasitas masyarakat untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah kolektif yang kompleks (Kumalasari et al., 2025).

Secara teoritis maupun praktis, penguatan etika komunikasi politik dan akuntabilitas diskursif memerlukan pendekatan multilevel: regulasi transparansi sumber pesan, literasi media kritis bagi publik, dan revitalisasi institusi penengah wacana. Kerangka etis ini tidak boleh dipahami sebagai pembatasan kebebasan berekspresi, melainkan sebagai prasyarat bagi kebebasan yang bertanggung jawab dalam ruang publik demokratis. Dengan demikian, tata kelola wacana publik yang etis bukan hanya soal imperatif moral, tetapi juga kebutuhan fungsional bagi keberlangsungan demokrasi deliberatif di era digital yang kian fragmentatif.

<p>Restrukturisasi tim komunikasi Presiden: sentralisasi pesan dan penguatan loyalitas simbolik (April 2025)</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penunjukan Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai juru bicara presiden, diikuti pelibatan Angga Raka Prabowo, M. Qodari, Hasan Nasbi, dan Juri Ardiantoro mencerminkan strategi sentralisasi produksi makna</li><li>• Langkah ini untuk konsolidasi arus informasi agar senafas dengan narasi Prabowo, sekaligus meminimalkan pesan yang selama ini kental diwarnai figur-figur pro-Jokowi. Dalam teori manajemen persepsi (Entman, 1993), homogenisasi sumber pesan akan memperkuat framing yang konsisten, sehingga publik menerima interpretasi tunggal kebijakan Prabowo. Simbol <i>inner circle</i> Istana juga mengaktifkan asosiasi kognitif antara kredibilitas personal dan legitimasi institusional, memperkuat otoritas simbolik melalui proksimitas dengan figur presiden.</li></ul>
<p>Rekayasa pesan digital dan jejaring Influencer: problem akuntabilitas dalam advokasi terselubung</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fenomena koordinasi pesan melalui jaringan influencer, akun media afiliasi, dan konten kreator yang selaras dengan narasi pemerintahan mencerminkan strategi representasi berbasis mikro-targeting dan identitas</li><li>• Praktik ini melanggar prinsip transparansi sumber dan otonomi khalayak. Publik tidak punya sumber info alternatif untuk menilai kredibilitas pesan. Problem ini diperparah oleh logika algoritma platform yang memprioritaskan viralitas ketimbang objektivitas informasi</li><li>• Ditelisik dari perspektif etika komunikasi politik, praktik ini juga melanggar prinsip otonomi khalayak, diperparah oleh perilaku elite politik yang hanya memprioritaskan viralitas diri dan kelompoknya, sehingga narasi non-etis dan anti-literasi dapat menyebar luas tanpa dan koreksi khalayak atau publik pembaca sebagai prasyarat legitimasi (Chouldry, 2012).</li></ul>

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

### Legitimasi Politik, Pembentukan Opini Publik, dan Efek Simbolik Komunikasi Elite di Lingkaran Prabowo–Gibran

Ekosistem wacana politik era Prabowo–Gibran ditandai oleh sentralisasi narasi publik melalui kantor komunikasi presiden. Sentralisasi wacana publik menjadi salah satu langkah strategis yang mendapat atensi khusus Prabowo adalah penguatan infrastruktur komunikasi pemerintah melalui pembentukan *Presidential Communication Office* (PCO). Secara formal, lembaga ini dibentuk untuk menyinkronkan pesan kebijakan, mempercepat diseminasi informasi, dan merespons dinamika opini publik digital. Target yang ingin dicapai oleh PCO adalah di bawah Prabowo, mencapai komunikasi strategis dilambangkan dengan 8

program *astacita* (delapan prinsip panduan), 17 program prioritas, dan 8 program percepatan pencapaian hasil terbaik. Namun, dalam praktiknya, keberadaan PCO memicu banyak perdebatan, terutama terkait apakah komunikasi pemerintah bergerak ke arah dialog deliberatif atau justru menuju sentralisasi narasi politik (ugm.ac.id., 2024).

Secara etis, legitimasi komunikasi politik pemerintah dilandasi prinsip normatif yang menjamin kualitas diskursus publik. Habermas (1991) menegaskan bahwa ruang publik demokratis memerlukan komunikasi yang rasional, partisipatif, dan terbuka terhadap kritik. Tesis ini diperkuat oleh pandangan Christians et al. (2009) yang menekankan akurasi faktual, transparansi sumber, otonomi khalayak, dan tanggung jawab sosial sebagai prasyarat penyampaian pesan. Namun, sentralisasi komunikasi dalam satu kanal simbolik ‘terkendali’ versi PCO berisiko memicu *discursive closure* (penyempitan ruang deliberasi). Realitas ini tercermin dari pucuk pimpinan PCO yang ada di bawah kendali mantan jebat kampanye Prabowo–Gibran (seperti Hasan Nasbi dan M Qodari). Realitas ini potensial mengaburkan batas antara komunikasi negara yang objektif-institusional versus narasi elektoral yang berciri subjektif-partisan. Ini memicu pertanyaan etis publik terkait netralitas birokrasi, independensi produksi pesan publik, dan integritas akuntabilitas diskursif dalam ruang demokrasi.

Strategi representasi adalah instrumen operasional peristiwa politik yang dikonstruksi, diseleksi, dan diedarkan kepada publik. Representasi biasanya beroperasi melalui mekanisme framing: menonjolkan aspek tertentu dari realitas sambil mengaburkan elemen lain untuk mendefinisikan masalah, interpretasi kausal, evaluasi moral, atau rekomendasi solusi tertentu. Dalam praktik komunikasi, strategi ini sering kali diintegrasikan dengan narasi emosional, simbol visual, dan kurasi algoritmik untuk memaksimalkan resonansi persepsi. Namun, ketika representasi menjadi terlalu selektif atau manipulatif, ia berpotensi mendistorsi pemahaman publik terhadap realitas kebijakan yang kompleks (Entman, 1993).

Framing ‘*gemoy*’ yang diusung tim sukses Prabowo-Gibran misalnya, adalah contoh upaya melanggengkan budaya politik dangkal yang selama ini menjadi masalah dalam sistem demokrasi Indonesia. Framing ini berpotensi membentuk pemilih non-kritis; yang teralihkan dari diskusi mendalam tentang program kerja, visi-misi, dan kapasitas memimpin, diarahkan ke ruang komunikasi artifisial. Ketika pemilih pemula dipaksa untuk menerima konstruksi tanpa makna, mereka kehilangan kesempatan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap track seorang pemimpin. Saat *humor* dan gaya komunikasi ‘lucu-lucuan’ menjadi menu utama kampanye, maka yang terjadi adalah proses depolitisasi (Sihombing & Ndona, 2026).

Ketegangan mendasar muncul ketika strategi representasi yang efektif secara instrumental bertentangan dengan kewajiban etis komunikasi politik. Dalam logika *post-truth*, keberhasilan pesan sering diukur melalui metrik keterlibatan aktif (*engagement*) dan viralitas, bukan melalui akurasi atau kontribusi terhadap gagasan politik akurat (Waisbord, 2023). Kondisi ini menciptakan insentif struktural bagi elite politik untuk memprioritaskan pembingkaian yang memobilisasi afeksi identitas ketimbang menyajikan analisis kebijakan politik yang komprehensif. Akibatnya, terjadi disonansi kognitif antara efisiensi persuasif dan integritas diskursif. Situasi ini akan melemahkan akuntabilitas komunikator terhadap publik.

Di sisi lain, akuntabilitas diskursif merujuk pada kewajiban komunikator politik untuk mempertanggungjawabkan klaim, asumsi, dan implikasi normatif dari pesan yang mereka sampaikan dalam ruang publik. Konsep ini melampaui akuntabilitas prosedural (misalnya,

kepatuhan terhadap regulasi penyiaran) dengan menekankan tanggung jawab epistemik dan moral terhadap kualitas wacana kolektif (Fraser, 2007; Couldry, 2012). Akuntabilitas diskursif mensyaratkan transparansi metodologis dalam produksi pesan, keterbukaan terhadap kritik substantif, dan kesediaan untuk merevisi klaim berdasarkan bukti baru. Tanpa mekanisme ini, komunikasi politik berisiko menjadi monolog legitimasi yang tertutup terhadap koreksi publik.

Problem utama dalam tata kelola wacana publik kontemporer adalah melemahnya institusi penengah (*intermediary institutions*) yang secara tradisional berfungsi sebagai penjaga akuntabilitas diskursif, seperti media independen, lembaga factchecking atau forum-forum deliberatif sipil. Ketika infrastruktur digital memungkinkan elite politik berkomunikasi langsung dengan konstituen tanpa filter editorial, mekanisme verifikasi dan koreksi kolektif potensial menjadi semakin marginal (Bennett & Livingston, 2020). Dalam kondisi ini, strategi representasi yang tidak etis dapat menyebar luas sebelum mendapat sanggahan substantif, sehingga memperkuat asimetri informasi antara elite dan masyarakat.

Implikasi demokratis dari problem ini bersifat struktural: ketika akuntabilitas diskursif melemah, kualitas legitimasi politik juga akan tergerus. Legitimasi politik yang dibangun melalui representasi manipulatif cenderung rapuh karena bergantung pada konsensus permukaan yang semu dan rentan terhadap disonansi kognitif ketika fakta alternatif muncul (Sunstein, 2017). Lebih jauh, degradasi wacana publik memperparah polarisasi afektif, di mana perbedaan kebijakan direduksi menjadi sekedar konflik identitas yang tidak terdamaikan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperdalam polarisasi afektif, memperlemah rasionalitas publik, dan mengurangi kapasitas masyarakat untuk membangun konsensus terhadap agenda kolektif.

<p>Respon pemerintah terkait tagar #IndonesiaGelap</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pada Februari 2025, ruang media sosial diramaikan oleh tagar #IndonesiaGelap yang viral sebagai ekspresi kekecewaan publik terhadap kebijakan efisiensi anggaran dan implementasi program prioritas pemerintah. Dalam 24 jam, tagar yang memperoleh jutaan interaksi di banyak platform media sosial dan menjadi salah satu indikator penting resistensi digital terhadap pemerintah. Analisis digital menunjukkan dominasi sentimen negatif terhadap tagar itu sebesar 81% (tempo.co, 2025)</li><li>• Pemerintah merespon dengan strategi <i>impression management</i>: upaya mempertahankan citra diri di tengah tekanan opini publik. Dalam konteks etika komunikasi, strategi tersebut memunculkan persoalan serius karena menggeser substansi kritik menjadi persoalan loyalitas politik. Kritik warga tidak lagi diposisikan sebagai bagian dari koreksi demokratis, tetapi sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran.</li></ul>
<p>Sentralisme pesan lembaga eksekutif vs pemantauan media dan pembatasan kritik publik</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sentralisme informasi eksekutif versus pemantauan media dan pembatasan kritik publik menunjukkan ada strategi homogenisasi berita untuk menjaga menyebarnya wacana kritis-alternatif. Meski secara manajerial efisien, pola ini berpotensi mereduksi pluralisme interpretasi dan memarginalisasi suara kritis</li><li>• Dalam perspektif akuntabilitas diskursif Dryzek (2000), saat sumber informasi disentralisasi pemerintah secara berlebihan, maka ruang kontestasi ide sebagai prasyarat legitimasi</li></ul>



demokratis akan menyempit (rumus: konsolidasi informasi → penyempitan kontestasi → pergeseran legitimasi). Dampaknya, publik hanya mendapat interpretasi tunggal atas kebijakan politik dari sisi pemerintah, tanpa pluralitas interpretasi, sehingga kapasitas masyarakat untuk melakukan evaluasi kritis atau kritik atas kinerja pemerintahan menjadi bias, tumpul, dan subjektif.

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

## KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa pola komunikasi politik elite era pemerintahan Prabowo–Gibran merepresentasikan rekonfigurasi legitimasi kekuasaan yang beroperasi melalui integrasi sistematis antara manajemen persepsi, produksi makna, dan konstruksi otoritas simbolik. Dalam ekosistem pascakebenaran (*post-truth*), narasi kebangsaan, simbol kenegaraan, dan konsistensi pesan lintas kanal tidak lagi berfungsi sekadar sebagai instrumen persuasi elektoral, melainkan sebagai mekanisme strategis untuk mengkonsolidasi dukungan, menaturalisasi otoritas, dan mempersempit ruang interpretasi yang berbeda di ruang publik.

Studi ini juga melihat ada semacam pola komunikasi politik elite era Prabowo–Gibran merepresentasikan rekonfigurasi legitimasi kekuasaan yang beroperasi melalui integrasi sistematis antara manajemen persepsi, produksi makna, dan konstruksi otoritas simbolik. Kajian juga memperkaya studi komunikasi politik dengan mengintegrasikan perspektif pembingkai Entman, otoritas simbolik Bourdieu, etika diskursif Habermas, dan perspektif *manufacturing consent* Herman dan Chomsky ke dalam satu kerangka analitis kritis.

Kajian ini juga memperkaya literatur komunikasi politik dengan mengintegrasikan perspektif pembingkai Entman, otoritas simbolik Bourdieu, etika diskursif Habermas, dan *manufacturing consent* Herman dan Chomsky ke dalam satu kesatuan kerangka analitis kritis. Integrasi ini memungkinkan pembacaan yang tidak hanya mendeskripsikan efektivitas strategis komunikasi elite, tetapi juga mengevaluasi integritas normatif praktik tersebut terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan otonomi khalayak. Temuan kajian menunjukkan bahwa ketika komunikasi lebih berorientasi pada pengendalian makna daripada deliberasi substantif, legitimasi politik berpotensi bergeser dari basis *rational-critical consent* menuju *managed consensus* yang rentan terhadap defisit kepercayaan jangka panjang.

Kajian merekomendasi penguatan tiga pilar akuntabilitas komunikasi pemerintahan: (1) institusionalisasi kanal deliberatif untuk uji rasional kebijakan publik; (2) transparansi data proaktif yang memungkinkan evaluasi independen oleh masyarakat sipil; dan (3) protokol etika komunikasi yang membedakan jelas antara persuasi demokratis dan manipulasi simbolik. Dengan demikian, revitalisasi ruang publik demokrasi di era digital memerlukan tidak hanya literasi media masyarakat, tetapi juga komitmen elite terhadap komunikasi yang partisipatif, transparan, dan bertanggung jawab secara diskursif.

Kajian juga mengusulkan agenda riset lanjut yang komparatif dan longitudinal, seperti menguji apakah pola komunikasi era Prabowo–Gibran merepresentasikan tren struktural komunikasi pemerintahan Indonesia pascareformasi, atau pola itu merepresentasi konfigurasi situasional yang dipengaruhi oleh konteks koalisi dan dinamika elektoral spesifik. Selain itu,

dimungkinkan penggunaan metodologi yang bisa mengintegrasikan analisis wacana kritis, *digital trace data*, dan survei persepsi publik agar temuan dapat lebih valid dan komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Fatih, I. Z. et al. (2024) Peran Algoritma Media Sosial dalam Penyebaran Propaganda Politik Digital Menjelang Pemilu. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 7(1), 1-12. doi: 10.7454/jkskn.v7i1.10090.
- asatunews.co.id (2026, April 28) “Prabowo Perkuat Tim Komunikasi Lewat Penunjukan Qodari dan Hasan Nasbi”. Accessed by [https://www.asatunews.co.id/prabowo-perombakan-tim-komunikasi-presiden#google\\_vignette](https://www.asatunews.co.id/prabowo-perombakan-tim-komunikasi-presiden#google_vignette).
- bbc.com (2025, 06 Januari) “Makan Bergizi Gratis Perdana Sasar 600 Ribu Orang, Jauh Dari Target Awal — Apakah Program ini Terlalu Tergesa-gesa?”. Accessed by <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2yww21708o>.
- Bennett, W. L., & Livingston, S. (2018) The Disinformation Order: Disruptive Communication and the Decline of Democratic Institutions. *European Journal of Communication*, 33(2), 122–39. doi: 10.1177/0267232118760317.
- Bennett, W. L., & Pfetsch, B. (2018) Rethinking Political Communication in a Time of Disrupted Public Spheres. *Journal of Communication*, 68(2), 243-253. doi: 10.1093/joc/jqx017.
- Bourdieu, P. (1991) *Language And Symbolic Power*. Accessed by [https://monoskop.org/images/4/43/Bourdieu\\_Pierre\\_Language\\_and\\_Symbolic\\_Power\\_1991.pdf](https://monoskop.org/images/4/43/Bourdieu_Pierre_Language_and_Symbolic_Power_1991.pdf).
- Chouldry, N. (2012) *Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice*. London: Polity Press.
- Christians, C. G. et al. (2009) Normative Theories of the Media: Journalism in Democratic Societies. Accessed by <https://www.scribd.com/document/661252711/Normative-Theories-of-the-Media-Journalism-in-Demo>.
- Creswell, J. W. & Poth, C. N. (2018) *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approaches* (4th Edition). Thousand Oaks: SAGE Publications Inc.
- Dryzek, J. S. (2000). *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*. New York: Oxford University Press.
- Entman, R. M. (1993) Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Accessed by <https://fbaum.unc.edu/teaching/articles/J-Communication-1993-Entman.pdf>.
- Habermas, J. (1991) *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* (Trans by Thomas Burger). Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Harsin, J. (2024) “Post-truth Politics and Epistemic Populism: About (Dis-)Trusted Presentation and Communication of Facts, Not False Information” In: Saul Newman & Maximilian Conrad (eds.) *Post-Truth Populism: A New Political Paradigm* (European Political Sociology). Switzerland: Palgrave (pp. 25-64).



- Herman, E. S., & Chomsky, N. (1988). *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*. New York: Pantheon Books.
- Hermawan, V. (2025). Political Communication in the Digital Era: The Role of Social Media in Shaping Public Opinion in the 2024 Election. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID)*, 4(5), 160–169.
- jppn.com (2025, April 11) “Pidato Prabowo di Parlemen Turki”. Accessed by <https://jakarta.jppn.com/politik/1598/presiden-prabowo-ngaku-grogi-pidato-parlemen-turki-tersenyum>.
- ksp.go.id.(2026, April 03) “Presiden Prabowo Bangun Ruang Diskusi Nasional, Antisipasi Dampak Geopolitik Dunia”. Accessed by <https://www.ksp.go.id/presiden-prabowo-bangun-ruang-diskusi-nasional-antisipasi-dampak-geopolitik-dunia.html>.
- Kumalasari, C. et al (2025) Ethics and Responsibility in Political Demagogy: A Conceptual Review and Practical Implications. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences (IJHES)*, 4(4), 1413-1419. doi: 10.55227/ijhess.v4i4.1520.
- Lim, M. (2022). Alternative Imaginations: Confronting and Challenging the Persistent Centrism in Social Media-Society Research. *Journal of Asian Social Science Research*, 4(1), 1-22. doi: 10.15575/jassr.v4i1.59.
- Lippman, W. (1922) *Public Opinion*. Accessed by [https://monoskop.org/images/b/bf/Lippman\\_Walter\\_Public\\_Opinion.pdf](https://monoskop.org/images/b/bf/Lippman_Walter_Public_Opinion.pdf)
- Lubke, S. (2025) “Political Communication”. In: Daniel Stockemer, Stephen Sawyer, & Audrey Gagnon (eds.) *IPSA Companion to Political Science*. Springer Nature Reference.
- Miles, M. B., et al. (2014) *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. London: SAGE Publications Inc.
- Mietzner, M. (2010). Political Conflict Resolution and Democratic Consolidation in Indonesia: The Role of the Constitutional Court. *Journal of Asian Studies*, 10(3), 397–424. doi: 10.1017/S1598240800003672.
- Nurhayati, A. (2025) “Di Balik Rutinitas Pemilu: Integritas di Tengah Ketegangan Institusional, Demokrasi, dan Kepemimpinan” In: Aniek Nurhayati & Firmansyah (eds.) *Integritas Demokrasi Lokal Catatan Pemilu Indonesia 2024*. Sidoardjo: CV. Duta Sains Indonesia.
- Putra, B. A. (2025) President Prabowo’s Political Communication on Environmental Issues in Constructing Climate Narrative. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(1), 429-437. doi: 10.30656/lontar.v13.i1.10322.
- Rahayu, H. S. et al. (2025) Political Communication Strategy in Legislative Elections in Indonesia (Case Study on Indonesian Legislative Members of the Golongan Karya Party). *Journal of Posthumanism*, 5(5), 2963-2984. doi: 10.63332/joph.v5i5.1701.
- Ramadhan, M. D., & Hendrik, D. (2025) Analysis of Political Reciprocity in the Coalition Strategy of Prabowo-Gibran in the 2024 General Election. *JPI: Jurnal Politik Indonesia*, 11(1), 1-16. doi: 10.20473/jpi.v11i1.66796.



- Rohmah, S. R., & Meriwijaya (2025) Narasi dan Wacana Komunikasi Politik Prabowo–Gibran dalam Kontestasi Pemilu 2024. *JURNAL DINAMIKA: Wacana Mahasiswa Berparadigma*, 6(2), 183-202. doi: 10.18326/dinamika.v6i2.183-202.
- Sihombing, F. T., & Ndonga, Y. (2026) Framing Gemoy Paslon Prabowo-Gibran: Upaya Meningkatkan Ketertarikan Pemilih Pemula (Studi Kasus di Desa Kalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi). *INOVASI: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 5(1), 193-207. doi: 10.55606/inovasi.v5i1.5369.
- Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. Princeton: Princeton University Press.
- Swari, N. K. T. N. et al. (2025) Dampak Penggunaan Media Sosial dan Kampanye Digital Terhadap Perilaku Pemilih Pemula (Gen Z) Dalam Pilkada Bali. *TRIWIKRAMA: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(5), 61-70. doi: 10.9963/fqbqqa30.
- Tapsell, R. (2021). Social Media and Elections in Southeast Asia: The Emergence of Subversive, Underground Campaigning. *Asian Studies Review*, 45(1), 117-134. doi: 10.1080/10357823.2020.1841093.
- tempo.co. (2025, March 19) “Tagar Indonesia Gelap Dapat 81 Persen Sentimen Negatif”. Accessed by <https://www.tempo.co/politik/tagar-indonesia-gelap-dapat-81-persen-sentimen-negatif-1221552>.
- Trzcinski, K. (2023) Power-Sharing in Indonesia: Stability Through Hybridity. In: Jelonek Adam (eds.) *Power-Sharing in the Divided Asian Societies*. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlage / V&R Unipress (pp. 13-43).
- ugm.ac.id (2024, December 17) “Presidential Communication Office Expected to Hear and Accept Public Aspirations”. Accessed by <https://ugm.ac.id/en/news/presidential-communication-office-expected-to-hear-and-accept-public-aspirations/>
- Vaara, E. et al. (2016) Narratives as Sources of Stability and Change in Organizations: Approaches and Directions for Future Research. *Academy of Management Annals*, 10(1), 495–520. doi: 10.5465/19416520.2016.1120963.
- Waisbord, S. (2018) The Elective Affinity Between Post-Truth Communication and Populist Politics. *Communication Research and Practice*, 4(1), 17-34. doi: 10.1080/22041451.2018.1428928.
- Warburton, E. & Aspinall, E. (2019) Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion (Contemporary Southeast Asia). *A Journal of International and Strategic Affairs* (ISEAS–Yusof Ishak Institute), 41(2), 255-285. doi: muse.jhu.edu/article/732138.
- Yin, R. K. (2018) *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th Edition). Thousand Oaks: SAGE Publications Inc.